

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala, 2002, *Reformasi Pertanahan: Pemberdayaan Hak-Hak Atas Tanah Ditinjau dari Segi Aspek Hukum, Sosial, Politik, Ekonomi, Hankam, Teknis, Agama dan Budaya*, Bandung: Mandar Maju.
- Chandra,S, 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Grasindo.
- Effendie, Bachtiar, 1983, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Alumni.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Ed.Rev., Cet.Ke-8, Jakarta: Djambatan.
- Ismaya, Samun, 2013, *Hukum Admmistrasi Pertanahan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Masri Singaribun dan Sofian Efendi, 1989, *Metode Penelitian Surve*, Jakarta: LP3ES.
- Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, 2008, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung: Mandar Maju.
- Parlindungan, A.P, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Ed.I. Cet Ke.1., Jakarta: Kencana.
- Soehadin, R, *Penyelesaian Sengketa Tanah Sesudah Berlakunya Undang-undang Pokok Agraria*, Surabaya: Usana Offset Printing.
- Soejono, Abdurrahman, 1998, *Prosedur Pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Manudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).

Sumardjono, Maria S.W, 2001, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.

Surahmat, Winarno, 1982, *Pengantar Metodologi Ilmiah*, Bandung: CV. Tarsito.

Sutedi, Adrian, 2012, *Sertifikat hak atas tanah*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wardiono, Kelik, 2005 , *Metodelogi Penelitian Hukum (Pendekatan Doktrinal)*, Surakarta: UMS Press.

### **Jurnal/Karya Ilmiah**

Joyo Winoto, “Reforma Agraria: Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat”, *Makalah Seminar Nasional, Penguatan Hak Kepada Rakyat dalam Reforma Agraria Melalui Persamaan Hak Memperoleh Hak Atas Tanah*, (Magister Kenotariatan Undip, Kanwil BPN Propinsi Jateng, KAPTI & IMMK, Semarang, 15 Mei 2008).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA).

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Pelayanan yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional.

TAP MPR IX/MPR/2001

**Website/Internet**

<http://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>

<http://suarabanyuurip.com/mobile/baca/di-blora-sertifikat-prona-tak-gratis>

<http://www.hukum-ut.id/2017/03/hukum-administrasi-pertanahan-agraria.html>

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/01/10/343341/pegawai-bpn-kalbar-ditangkap-karena-palsukan-sertifikat-tanah>

<http://www.spi.or.id/?p=1834>